



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

KANTOR CAMAT PRAYA

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

KANTOR CAMAT PRAYA

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan kedepan.

Praya, 30 Januari 2025
Kantor Camat Praya

Luh Balya Wiranegara, S.STP.M.AP
NIP. 198410032004121001

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	9
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
1.3 Sistematika Penulisan Catatanatas Laporan Keuangan.....	13
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD.....	14
2.1 Kebijakan Keuangan.....	14
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	18
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	18
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	19
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD.....	20
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	20
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	21
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD.....	24
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	36

5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	36
5.2 Pos-pos Neraca	43
5.3 Pengungkapan atas Pos Aset dan Kewajiban.....	53
5.4 Pos-pos Laporan Operasional	58
5.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	69
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	72
6.1 Gambaran Umum OPD.....	72
6.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah	73
BAB VII PENUTUP.....	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Camat Praya Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Camat Praya Tahun 2024.....	16
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Camat Praya Tahun 2024.....	16
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	18
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	36
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah.....	37
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	38
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	38
Tabel 5.5 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	38
Tabel 5.6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	40
Tabel 5.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	40
Tabel 5.8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin....	41
Tabel 5.9 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41
Tabel 5.10 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan irigasi dan Jaringan	41
Tabel 5.11 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	41
Tabel 5.12 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA.....	42
Tabel 5.13 Rincian Aset.....	43
Tabel 5.14 Rincian Aset Lancar.....	43
Tabel 5.15 Persediaan.....	46
Tabel 5.16 Daftar Nilai Aset Tetap.....	47
Tabel 5.17 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah.....	47
Tabel 5.18 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	48
Tabel 5.19 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024..	48
Tabel 5.20 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	49
Tabel 5.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	50
Tabel 5.22 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	50
Tabel 5.23 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024..	51
Tabel 5.24 Aset Tetap Lainnya.....	51
Tabel 5.25 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.....	51
Tabel 5.26 Rincian Kewajiban.....	30
Tabel 5.27 Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	54
Tabel 5.28 Rincian Utang Belanja.....	55
Tabel 5.29 Rincian Utang Belanja Pegawai.....	56
Tabel 5.30 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa.....	56

Tabel 5.31 RincianPendapatan - LO	58
Tabel 5.32 Pendapatan Asli Daerah – LO.....	58
Tabel 5.33 RincianPendapatan Asli Daerah.....	59
Tabel 5.34 Rincian Beban.....	60
Tabel 5.35 Rincian Beban Operasional.....	60
Tabel 5.36 Rincian Beban Pegawai.....	61
Tabel 5.37 Penjelasan Selisih BebanPegawai LO.....	62
Tabel 5.38 Rincian Beban Barang dan Jasa	63
Tabel 5.39 PenjelasanSelisih Beban Barang dan Jasa-LO	64
Tabel 5.40 Rincian Beban Peenyusutan dan Amortisasi	65
Tabel 5.41 RekapitulasiPerhitungan Surplus/(Defisit) dariKegiatanOperasional.....	66
Tabel 5.42 Rincian Surplus/(Defisit) – LO	67
Tabel 5.43 Ekuitas Awal - LO	69
Tabel 5.44 Surplus/(Defisit)-LO	69
Tabel 5.45 RincianEkuitas Akhir.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2024 : a. Daftar Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 b. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
Lampiran 9	:	Kertas Kerja Laporan Operasional
Dst...	:	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 30 Januari 2025
Kantor Camat Praya



Olivia Balya Wiranegara, S.STP.M.AP
NIP. 198410032004121001



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

KANTOR CAMAT PRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT PRAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
4.1.01	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00		0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00		0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00		0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	0,00	0,00		0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00		0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00		0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	0,00		0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00		0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00		0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	0,00	0,00		0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangu	0,00	0,00		0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu ([],PBJT),	0,00	0,00		0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00		0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00		0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00		0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00		0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentu	0,00	0,00		0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pe	0,00	0,00		0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00		20.235.068,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00		0,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Keseh	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG S	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00		0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Keter	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Keseh	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
5	BELANJA DAERAH	20.892.970.942,00	20.500.459.346,00	98,12	20.942.668.725,00

5.1	BELANJA OPERASI	20.220.558.006,00	19.842.176.698,00	98,13	18.370.088.993,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.546.951.704,00	9.377.511.534,00	98,23	8.279.711.233,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.391.621.989,00	6.281.339.943,00	98,27	5.639.806.825,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.052.441.715,00	2.993.337.591,00	98,06	2.539.195.408,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertir	102.888.000,00	102.834.000,00	99,95	100.709.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00		0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00		0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DP	0,00	0,00		0,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.673.606.302,00	10.464.665.164,00	98,04	10.090.377.760,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.443.236.915,00	5.330.347.561,00	97,93	5.218.307.397,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.526.291.987,00	4.454.277.645,00	98,41	4.520.978.203,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	451.325.000,00	451.109.000,00	99,95	115.950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	132.298.000,00	108.476.558,00	81,99	139.437.760,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberik	120.454.400,00	120.454.400,00	100,00	95.704.400,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Or	0,00	0,00		0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada	0,00	0,00		0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00		0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.220.558.006,00	19.842.176.698,00	98,13	18.370.088.993,00
5.2	BELANJA MODAL	672.412.936,00	658.282.648,00	97,90	2.572.579.732,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.189.368,00	458.702.648,00	97,14	1.869.541.432,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00		13.110.990,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	160.000.000,00	153.760.000,00	96,10	1.511.045.246,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00		7.529.899,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00		0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tar	131.325.520,00	129.123.783,00	98,32	200.518.097,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, da	7.237.840,00	7.102.000,00	98,12	29.220.400,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Keseh	0,00	0,00		9.261.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00		0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	168.450.520,00	163.546.865,00	97,09	98.855.800,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00		0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.175.488,00	5.170.000,00	99,89	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00		0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00		0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00		0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00		0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.223.568,00	199.580.000,00	99,68	672.139.600,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	103.636.000,00	103.130.000,00	99,51	573.048.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pastil	96.587.568,00	96.450.000,00	99,86	99.091.600,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	0,00	0,00		0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	23.817.500,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00		0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00		0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00		23.817.500,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00		0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.081.200,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00		0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/	0,00	0,00		0,00

2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		7.081.200,00
2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00		0,00
2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Be	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	672.412.936,00	658.282.648,00	97,90	2.572.579.732,00
	JUMLAH BELANJA	20.892.970.942,00	20.500.459.346,00	98,12	20.942.668.725,00
	SURPLUS/DEFISIT	-20.892.970.942,00	-20.500.459.346,00	98,12	-20.922.433.657,00
	PEMBIAYAAN DAERAH				
5.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Se	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian	0,00	0,00		0,00
5.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-20.892.970.942,00	-20.500.459.346,00	98,12	-20.922.433.657,00

Praya, 30 Januari 2025
 CAKUPAN PRAYA

 LALU BALI ZUMIRANEKARA, S.STP, M.A.P
 NIP. 19841003 2004121 001



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**KANTOR CAMAT PRAYA
NERACA**

Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REF CALIK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	6.296.643.153,94	5.696.112.577,94
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	4.756.111.563,88	4.258.662.563,88
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	29.661.300,00	29.661.300,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	945.000,00	945.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	-	-
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.255.890.059,96)	(3.385.030.374,96)
ASSET INVESTASI	5.3.1.4	-	-
Properti Investasi Tanah	5.3.1.4.1	-	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.3	-	-
ASSET LAINNYA	5.3.1.5	-	-
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	-	-
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	-	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.5	-	-
WAJIBAN	5.3.2	230.858.374,00	194.377.545,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	230.858.374,00	194.377.545,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-
Utang Bunga	5.3.2.1.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	-	-
Utang Belanja dan transfer	5.3.2.1.5	230.858.374,00	194.377.545,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	-	-
LIUITAS	5.3.3	12.185.361.583,86	11.937.298.521,86
SALAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.416.219.957,86	12.131.676.066,86

Praya, 25 Januari 2025



WIRANEGARA, S.TP, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT PRAYA
NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFE CALIK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
T	5.3.1	12.416.219.957,86	12.131.676.066,86
T LANCAR	5.3.1.1	439.000,00	215.000,00
dan Setara Kas	5.3.1.1.1	-	-
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	-	-
Kas di Bendahara BOSP	5.3.1.1.1.5	-	-
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	5.3.1.1.1.6	-	-
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	-	-
utang	5.3.1.1.2	-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	-	-
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	-	-
Piutang Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.3.1.1.2.3	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.2.6	-	-
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	-	-
piutang Piutang	5.3.1.1.3	-	-
Penyisihan piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.2	-	-
an Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	-	-
sediaan	5.3.1.1.5	439.000,00	215.000,00
ESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	-	-
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	-	-
Penyisihan dana bergulir	5.3.1.2.1.2	-	-
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	-	-
ET TETAP	5.3.1.3	12.415.780.957,86	12.131.461.066,86
Tanah	5.3.1.3.1	5.588.310.000,00	5.531.110.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**KANTOR CAMAT PRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT PRAYA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN DAERAH - LO	5.4.1	-	20.235.068,00	(20.235.068,00)	(100,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1	-	20.235.068,00	-	(100,00)
Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	-	-	-	-
Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	-	20.235.068,00	(20.235.068,00)	(100,00)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA	5.4.1.2.1	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.1.1	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.2	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus-Fisik - LO	5.4.1.2.1.3	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik - LO	5.4.1.2.1.4	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	5.4.1.2.2	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.2.1	-	-	-	-
Dana Desa - LO	5.4.1.2.2.2	-	-	-	-
TRANSFER ANTAR DAERAH - LO	5.4.1.2.3	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.3.1	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.3.2	-	-	-	-
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	-	-	-	-
Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.4.1.3.2	-	-	-	-
BEBAN DAERAH	5.4.2	20.460.935.570,00	19.154.390.985,98	1.306.544.584,02	6,82
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	20.460.935.570,00	19.154.390.985,98	1.306.544.584,02	6,82
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	9.413.692.766,00	8.259.326.740,00	1.154.366.026,00	13,98
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	10.194.543.833,00	10.098.866.338,00	95.677.495,00	0,95
Beban Bunga	5.4.2.2	-	-	-	-
Beban Subsidi	5.4.2.3	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.4	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	852.698.971,00	796.197.907,98	56.501.063,02	7,10
BEBAN TRANSFER	5.4.2.8	-	-	-	-
Beban Bagi Hasil	5.4.2.8.1	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.8.2	-	-	-	-
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.9	-	-	-	-

Beban tak terduga	5.4.2.9.1	-	-	-	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	(20.460.935.570,00)	- 19.134.155.917,98	(1.326.779.652,02)	6,93
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1	-	-	-	
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	-	-	-	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.1	-	-	-	
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2	-	-	-	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2	-	-	-	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.2	-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON -		-	-	-	
POS LUAR BIASA	5.4.5				
Pendapatan Luar Biasa	5.4.5				
Beban Luar Biasa	5.4.5	-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.7	(20.460.935.570,00)	- 19.134.155.917,98	(1.326.779.652,02)	6,93

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Praya, 30 Januari 2025
 KEPALA PRAYA

 LALU SAIFUL WIDIARAGAWA, S.STP.M.AP
 NIP.198410052004121001





**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**


**KANTOR CAMAT PRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

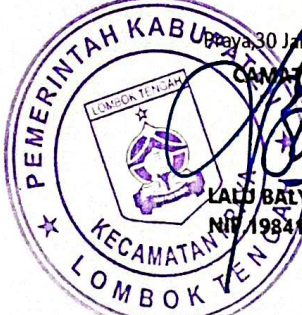


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT PRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

o	Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	11.937.298.521,86	10.159.264.745,84
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	- 20.460.935.570,00	- 19.134.155.917,98
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	57.200.000,00	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1	-	-
	Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.2	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.3	57.200.000,00	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.4	-	-
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.5	-	-
4	RK PPKD	5.6.3	20.651.798.632,00	20.912.189.694,00
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4	12.185.361.583,86	11.937.298.521,86

catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Praya, 30 Januari 2025
CAMAT PRAYA

LAILI BALYA WIRANEGARA, S.STP.M.AP
NIK 198410032004121001





**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**KANTOR CAMAT PRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

BABI PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Kantor Camat Praya Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
	Pendapatan				
	Jumlah Pendapatan				
	Belanja				
	Belanja Pegawai	8.988.687.677,00	9.546.951.704,00	558.264.027,00	6,21
	Belanja Barang dan Jasa	10.617.581.408,00	10.673.606.302,00	56.024.894,00	0,53
	Belanja Modal	728.456.193,00	672.412.936,00	(14.130.256,00)	(2,10)
	Jumlah Belanja	20.334.726.278,00	20.892.970.942,00	600.166.633,00	2,96
	Defisit/Surplus	(20.334.726.278,00)	(20.892.970.942,00)	(600.166.633,00)	(2,96)

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
- a. Memilih – milih kegiatan dan belanja yang dapat dilakukan efisiensi secara tepat dengan mencoret kegiatan yang tidak member nilai tambah signifikan terhadap pencapaian target.
 - b. Mengurangi frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas dan kegiatan di luar kantor Camat Praya
 - c. Mengefektifkan kembali penggunaan teknologi informasi untuk keperluan rapat dan koordinasi
 - d. Memperkuat system pengawasan yang lebih efektif dari unit kepatuhan internal.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Minimnya/keterbatasan Sumber Daya Manusia/Aparatur yang memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga penyerapan dan pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Praya yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Program ini adalah tercapainya Nilai SAKIP OPD..Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 5. kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp9.799.550.850,00 terealisasi senilai Rp9.607.518.051,00 atau 98,40 %
- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
Tujuan Program ini Tercapainya Persentase penyelenggaraan Pelayanan yang dilimpahkan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp56.905.925,00 terealisasi senilai Rp55.708.325,00 atau 97,90 %
- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tujuan Program ini Tercapainya Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp10.447.779.781,00 terealisasi senilai Rp10.274.445.128,00 atau 98,34%
- 1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tujuan Program ini Tercapainya Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Masyarakat Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp50.850.000,00 terealisasi senilai Rp49.267.500,00 atau 96,89%
- 1) Program Penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum
Tujuan Program ini Tercapainya Persentase Urusan Pemerintah Umum yang di Koedinasikan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran

setelah perubahan senilai Rp518.440.486,00 terealisasi senilai Rp502.645.926,00 atau 96,95%

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Tujuan Program ini Tercapainya Persentase Desa yang Menyampaikan laporan Kinerja Tepat Waktu Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp19.443.900,00 terealisasi senilai Rp19.198.600,00 atau 98,16%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Praya Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
I	Pendapatan				
	Jumlah Pendapatan				
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	19.606.269.085,00	20.220.558.006,00	19.842.176.698,00	98,13
1.1	Belanja Pegawai	8.988.687.677,00	9.546.951.704,00	9.377.511.534,00	98,23
1.2	Belanja Barang	10.617.581.408,00	10.673.606.302,00	10.464.665.164,00	98,04
1.3	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal	728.456.193,00	672.412.936,00	658.282.648,00	97,90
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	512.302.625,00	472.189.368,00	458.702.648,00	97,14
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.153.568,00	200.223.568,00	199.580.000,00	99,68
	Jumlah Belanja	20.334.725.278,00	20.892.970.942,00	20.500.459.346,00	98,12

Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya senilai Rp392.511.596,00 atau 88%.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kantor Camat Praya Tahun 2024

Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
Program Penunjang Urusan Pemerintah	(Program Penunjang Urusan	9.799.550.850	9.607.518.051	98,40

Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)			
Kegiatan .1 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : dana			
	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.378.615	71.917.073	93
	Outcome : Renstra,LKJIP,DPA			
Kegiatan .Administrasi Perangkat Daerah	Input : dana	9 553 397 072	938887278	98
	Output : Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
	Outcome : Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : dana	43.778.857	39.546.857	90
	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
	Outcome : Laporan Administrasi Umum			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : dana	47.140.800	34.190.653	73
	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Komunikasi Air,Listrik			
	Outcome : Layanan Pemerintah Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Input : dana Output: Pemeliharaan	77.855.506	72.988.190	94

dan atas Laporan Keuangan Dinas Badan Kantor Camat Praya .Kabupaten Lombok Tengah TA 2024

Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas, Pemeliharaan peralatan Mesin Lainnya Outcome: BMD Kondisi Baik (PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK)	56.905.925	55.708.325	97,90
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Input : dana Output: Jumlah Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan Outcome: Laporan Hasil Penyelesaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	56.905.925	55.708.325	98
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN)	35.747.115	35.747.115	100
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Input: Dana Output: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa Outcome: Laporan Hasil Koordinasi Pemberdayaan Desa	35.747.115	35.747.115	100
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Input: Dana OUTPUT: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	10.412.032.666	10.238.698.013	98

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	musyawarah Perencanaan Pembangunan dikelurahan Outcome: Laporan Perkembangan dan Pemberdayaan Kelurahan (PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)	50.850.000	49.267.500	97
	Kegiatan KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Input: Dana Output: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian TNI, dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan Outcome: Laporan Sinergitas Kepolisian	508.50.000	49.267.500	97
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	(PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM)	518.440.486	502.645.926	97
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Input: Dana Output: Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Outcome: Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	518.440.486	50.2645.926	97
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	(PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)	19.443.900	19.198.600	99
	KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Input: Dana Output: Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan	19.443.900	19.198.600	99

ditataskan atas Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor Camat Praya .Kabupaten Lombok Tengah TA 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Desa Outcome: Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

(Penjelasan Capaian kinerja dan Kegiatan.....)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN					
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			20.235.068,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan					
B	BELANJA					
1	Belanja Pegawai	9.546.951.704,00	9.377.511.534,00	8.279.711.233,00	98,23	11,71
2	Belanja Barang Jasa	10.673.606.302,00	10.464.665.164,00	10.090.377.760,00	98,04	3,58
3	Belanja Modal	672.412.936,00	658.282.648,00	2.541.681.032,00	97,90	(286,11)
	Jumlah Belanja	20.892.970.942,00	20.500.459.346,00	20.911.770.025,00	98,12	(2,01)

Dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp392.511.596,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp20.892.970.942,00 terealisasi Rp20.500.459.346,00 atau 98,12%

Capaian bagian belanja senilai 98,12% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp9.546.951.704,00 terealisasi senilai Rp9.377.511.534,00,00 atau 98,23%
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp10.673.606.302,00 terealisasi senilai Rp10.464.665.164,00 atau 98,04%

- c. Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp672.412.936,00 terealisasi senilai Rp658.282.648,00 atau 98,12%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami penurunan 100%, yaitu dari Rp20.235.068,00 pada tahun 2023 menjadi Rp0,00 pada tahun 2024.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi senilai (2,16)%, yaitu Rp20.942.668.725,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp20.500.459.346,00 Pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Praya .Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikator terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tu pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimak: utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak program yang telah ditetapkan.

- b. Asumsi Kestinambungan Entitas;
Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
- c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);
Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrual (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrual untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

2. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

1.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

1.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

1.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan at as LRA unto Pos Penda Patan TA 2024 dan 2023 aitu Rician at as salvo Penda Patan yang dangerman dan direalisasikan pada TA 2024, persentase campaign realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	20.235.068,00

5.1.1.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
1	Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
	Pendapatan dari Pengembalian				
	Total	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp20.500.459.346,00 mencapai 98,12% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp20.892.970.942,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	20.220.558.006,00	19.842.176.698,00	98,13	18.370.088.993,00
2.	Belanja Modal	672.412.936,00	658.282.648,00	97,90	2.572.579.732,00
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-
	Jumlah	20.892.970.942,00	20.500.459.346,00	98,12	20.942.668.725,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp19.842.176.698,00 atau mencapai 98,13% dari anggaran Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp20.220.558.006,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	9.546.951.704,00	9.377.511.534,00	98,23	8.279.711.233,00
2	Belanja Barang Jasa	10.673.606.302,00	10.464.665.164,00	98,04	10.090.377.760,00
3	Belanja Bunga	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	0	0	0	0
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
Jumlah		20.220.558.006,00	19.842.176.698,00	98,13	18.370.088.993,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp9.377.511.534,00 atau mencapai 98,23% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp9.546.951.704,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai	9.546.951.704,00	9.377.511.534,00	98,23	8.279.711.233,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.391.621.989,00	6.281.339.943,00	98,27	5.639.806.825,00
	a Belanja Gaji Pokok ASN	5.087.650.917,00	5.062.210.817,00	99,50	4.506.951.420,00
	b Belanja Tunjangan Keluarga ASN	497.189.326,00	478.975.930,00	96,34	422.455.122,00
	c Belanja Tunjangan Jabatan ASN	350.530.944,00	348.810.000,00	99,51	312.600.000,00
	d Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	166.237.363,00	118.605.000,00	71,35	126.635.000,00
	e Belanja Tunjangan Beras ASN	275.407.843,00	269.257.560,00	97,77	263.826.060,00
	f Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	13.956.946,00	3.412.287,00	24,45	7.271.084,00
	g Belanja Pembulatan Gaji ASN	648.650,00	68.349,00	10,54	68.139,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.052.441.715,00	2.993.337.591,00	98,06	2.539.195.408,00
	a Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.052.441.715,00	2.993.337.591,00	98,06	2.539.195.408,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	102.888.000,00	102.834.000,00	99,95	100.709.000,00

	a	Belanja Honorarium	100.488.000,00	100.434.000,00	99,95	100.709.000,00
	b	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
Jumlah			9.546.951.704,00	9.377.511.534,00	98,23	8.279.711.233,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1... Bertambahnya Pegawai Kantor Camat Praya Pada tahun 2024
2.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp10.464.665.164,00 atau mencapai 98,04% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp10.673.606.302,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa	10.673.606.302,00	10.464.665.164,00	98,04	10.090.377.760,00
1	Belanja Barang	5.443.236.915,00	5.330.347.561,00	97,93	5.218.307.397,00
	a Belanja Barang Pakai Habis	5.443.236.915,00	5.330.347.561,00	97,93	5.218.307.397,00
2	Belanja Jasa	4.526.291.987,00	4.454.277.645,00	98,41	4.520.978.203,00
	a Belanja Jasa Kantor	4.278.935.345,00	4.215.805.254,00	98,52	4.216.438.233,00
	b Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.672.000,00	28.425.005,00	92,67	23.195.138,00
	d Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.424.464,00	38.046.064,00	99,02	137.858.195,00
	f Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	13.688.322,00	13.688.322,00	100,00	27.376.637,00
	g Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.421.856,00	31.913.000,00	87,62	15.110.000,00
	j Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	128.150.000,00	126.400.000,00	98,63	101.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	451.325.000,00	451.109.000,00	99,95	115.950.000,00
	a Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.390.000,00	149.390.000,00	100,00	105.960.000,00
	b Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301.935.000,00	301.719.000,00	99,93	9.990.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	132.298.000,00	108.476.558,00	81,99	139.437.760,00
	a Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	132.298.000,00	108.476.558,00	81,99	139.437.760,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.454.400,00	120.454.400,00	100,00	95.704.400,00

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah TA 2024

a	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.454.400,00	120.454.400,00	100,00	95.704.400,00
	Jumlah	10.673.606.302,00	10.464.666.164,00	98,04	10.090.377.760,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga TA 2024 tidak terdapat anggaran maupun realisasi.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Bunga TA 2024 tidak terdapat anggaran maupun realisasi.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bunga TA 2024 tidak terdapat anggaran maupun realisasi.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp658.282.648,00 atau mencapai 98,13 dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp672.412.936,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Tanah	472.189.368,00	458.702.648,00	97,14	1.869.641.432,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	200.223.568,00	199.580.000,00	99,68	672.139.600,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	672.412.936,00	658.282.648,00	97,90	2.641.681.032,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp458.702.648,00 atau mencapai 97,14% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp472.189.368,00. dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.15. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.189.368,00	458.702.648,00	97,14	1.869.541.432,00
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	13.110.990,00
a	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	13.110.990,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	160.000.000,00	153.760.000,00	96,10	1.511.045.246,00
a	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	160.000.000,00	153.760.000,00	96,10	1.511.045.246,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	7.529.899,00
a	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-	7.529.899,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-
a	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	131.325.520,00	129.123.783,00	98,32	200.518.097,00
a	Belanja Modal Alat Kantor	19.165.994,00	18.743.583,00	97,80	-
b	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	112.159.526,00	110.380.200,00	98,41	200.518.097,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.237.840,00	7.102.000,00	98,12	29.220.400,00
a	Belanja Modal Alat Studio	7.237.840,00	7.102.000,00	98,12	19.104.400,00
b	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	10.116.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	9.261.000,00
a	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	-	9.261.000,00
8	Belanja Modal Komputer	168.450.520,00	163.546.865,00	97,09	98.855.800,00
a	Belanja Modal Komputer Unit	122.686.745,00	118.241.545,00	96,38	79.156.200,00
b	Belanja Modal Peralatan Komputer	45.763.775,00	45.305.320,00	99,00	19.699.600,00
9	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.175.488,00	5.170.000,00	99,89	-
a	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5.175.488,00	5.170.000,00	99,89	-
	Jumlah	472.189.368,00	458.702.648,00	97,14	1.869.541.432,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak ada Pengadaan Kendaraan Motor Kepala Lingkungan dan Mobil Dinas Camat Praya pada Tahun 2024.
- 2.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp199.580.000,00 atau mencapai 99,68% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp200.223.568,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.223.568,00	199.580.000,00	99,68	672.139.600,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	103.636.000,00	103.130.000,00	99,51	573.048.000,00
	a Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.636.000,00	103.130.000,00	99,51	573.048.000,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	96.587.568,00	96.450.000,00	99,86	99.091.600,00
	a Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	96.587.568,00	96.450.000,00	99,86	99.091.600,00
Jumlah		200.223.568,00	199.580.000,00	99,68	672.139.600,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Karena Pagu Anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lebih Besar di Tahun 2023.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	23.817.500,00
1	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	23.817.500,00
	a Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	23.817.500,00
Jumlah		-	-	-	23.817.500,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.

Tabel 5.18. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	7.081.200,00
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	7.081.200,00
	a Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	7.081.200,00
Jumlah		-	-	-	7.081.200,00

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp0,00, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp20.500.459.346,00, sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar (Rp20.500.459.346,00) atau (98,12)% dari anggaran sebesar (Rp20.892.970.942,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	20.235.068,00
2	Belanja	20.892.970.942,00	20.500.459.346,00	98,12	20.942.668.725,00
Surplus/ (Defisit)		20.892.970.942,00	20.500.459.346,00	98,12	20.922.433.657,00

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, merupakan unsur Penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kecamatan Praya adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahi oleh Bupati Kepada Camat sebagai perangkat daerah. Sementara itu untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Kecamatan Praya Tengah menyelenggarakan fungsi-fungsi :

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Camat mempunyai fungsi:

- a. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan Pemerintah Daerah yang didelegasikan oleh Bupati.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

Perumusan dan penetapan rencana strategis dan program kerja kecamatan;

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
- Pembinaan manajemen keuangan dan kepegawaian lingkup Kecamatan;
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi terkait;
- Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja;
- Perumusan kebijakan teknis kewilayahan sesuai lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pembinaan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa/ kelurahan ataupun kerja sama desa/ kelurahan dengan pihak ketiga;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau pegawai Kelurahan;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pembinaan administrasi kependudukan lingkup kecamatan;
- Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan rekomendasi teknis tertentu sesuai peraturan perundang-undang;
- Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang ekonomi Pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah pembangunan di desa/kelurahan dan tingkat Kecamatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6.2. Sumber Daya Kantor Camat Praya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 maka setiap desa harus dilengkapi dengan aparat pemerintahan yang akan mengatur jalannya pemerintahan di tingkat desa sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kecamatan. Aparat Pemerintahan di Kecamatan Praya yang terdiri dari : 1 orang Camat, 1 orang Sekertaris yakni Sekcam, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib).

Jumlah kariawan/karyawati Kantor Camat Praya sebanyak 38 orang PNS dan 8 orang tenaga honorer yang terdiri dari :

Golongan IV : 2 orang

Golongan III : 80 orang

Golongan II : 15 orang

Adapun jumlah pegawai Kecamatan Praya yang menduduki jabatan structural adalah :

a. Camat (Eselon III/a) : 1 orang

b. Sekretaris Camat (Eselon III/b) : 1 orang

c. Kepala Seksi (Eselon IV/a) : 4 orang

d. Kepala Sub. Bagian (Eselon IV/b) : 2 orang

Berdasarkan pendidikan PNS di Kecamatan Praya sebagai berikut :

S2 : 1 orang

S1 : 50 orang

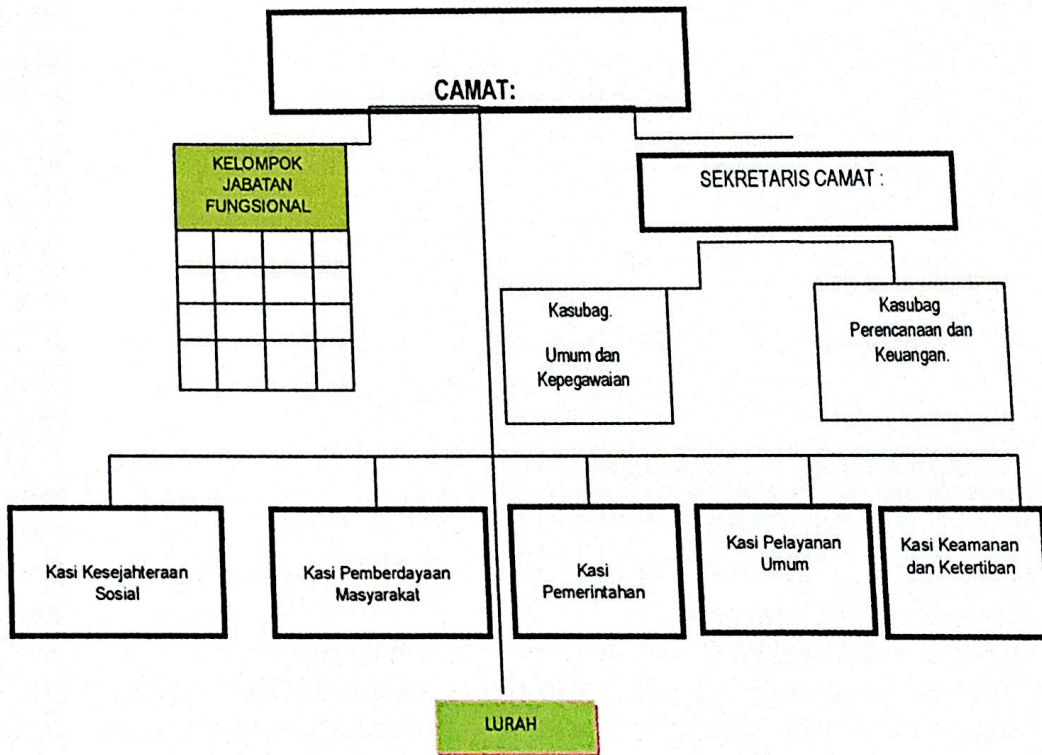
D3 : 9 orang

D4 : 4 orang

SLTA Sederajat : 29 orang

SLTP Sederajat : 1 orang

Struktur Organisasi Kecamatan Praya



5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan OPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp12.416.219.957,86 dan Rp12.131.676.066,86 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.29.Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	439.000,00	215.000,00
2	Investasi Jangka Panjang		
3	Aset Tetap	12.358.580.957,86	12.131.461.066,86
4	Properti Investasi		
5	Aset Lainnya		
	Jumlah	12.416.219.957,86	12.131.676.066,86

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.439.000,00 dan Rp215.000,00 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.30. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas		
2	Piutang		
3	Penyisihan Piutang		
4	Beban dibayar dimuka		
5	Persediaan	439.000,00	215.000,00
	Jumlah	439.000,00	215.000,00

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek

yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

5.3.1.1.4 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset lancar yang timbul karena terdapat perikatan antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode belum seluruhnya diserahkan.

Saldo Beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.341.500,00 dan Rp215.000,00 Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	439.000,00	215.000,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	Bahan-Isi Tabung Gas		
3	Dst		
	Jumlah	439.000,00	215.000,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran(lampiran memuat saldo awal, pembelian, pengurangan dan saldo akhir,..)

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp12.358.580.957,86 dan Rp12.131.461.066,86 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.52. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	5.588.310.000,00	5.531.110.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.296.643.153,94	5.696.112.577,94
3	Gedung dan Bangunan	4.756.111.563,88	4.258.662.563,88
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	29.661.300,00	29.661.300,00
5	Aset Tetap Lainnya	945.000,00	945.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	16.671.671.017,82	15.516.491.441,82
7	Akumulasi Penyusutan	(4.255.890.059,96)	(3.385.030.374,96)
	Jumlah Bersih	12.415.780.957,86	12.131.461.066,86

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.3.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp5.588.310.000,00 dan Rp5.531.110.000,00, aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.53. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah		
1.3.1.01	Tanah		
1.3.1.01.01	Tanah Persil		
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal dst	5.588.310.000,00	5.531.110.000,00

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp6.296.643.153,94 dan Rp5.696.112.577,94 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.55Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	6.296.643.153,94	5.696.112.577,94
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.808.468.430,98	3.484.458.430,98
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.350.000,00	2.350.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	25.556.700,00	25.556.700,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.282.691.207,98	1.176.837.496,98
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	102.516.000,00	100.566.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.671.000,00	16.671.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	75.782.200,00	75.782.200,00
1.3.02.10	Komputer	913.271.264,98	749.724.399,98
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	31.794.600,00	31.794.600,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	37.541.750,00	32.371.750,00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp628.202.648,00 dan pengurangan senilai Rp27.672.072,00 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56.Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	5.696.112.577,94
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	458.702.648,00

No	Uraian	Nilai (RP)
2	Mutasi antar OPD	169.500.000,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	628.202.648,00
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
2	Ekstracomtabel	27.672.072,00
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
4	Reklas ke KIB Lainnya	
5	Mutasi antar OPD	
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang	27.672.072,00
IV	Saldo Akhir	6.296.643.153,94

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.756.111.563,88 dan Rp4.258.662.563,88 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel :5.57.Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	4.756.111.563,88	4.258.662.563,88
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3.952.720.380,00	3.551.721.380,00
1.3.3.02	Monumen	0,00	0,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	803.391.183,88	706.941.183,88

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.58.Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	4.258.662.563,88
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	199.580.000,00
2	Nilai Taksiran	
3	Aset yang di peroleh dari Hibah	
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	297.869.000,00
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	

No	Uraian	Nilai (RP)
7	Belanja Modal Melalui BTT	
8	Mutasi antar OPD	
9	Reklas Dari DED/aset lainnya	
	Jumlah Mutasi Tambah	497.449.000,00
III	Pengurangan	
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
2	Mutasi antar OPD	
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	
5	Extracomtable	
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume	
9	Reklas ke Persediaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
IV	Saldo Akhir	4.756.111.563,88

5.3.1.3.4 . Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp29.661.300,00 dan Rp29.661.300,00 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.59 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	29.661.300,00	29.661.300,00
1.3.4.02	Bangunan Air	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	24.661.300,00	24.661.300,00
1.3.4.05	Dst...		

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.60 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	29.661.300,00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
4	Penerimaan Hibah	
5	Mutasi antar OPD	
6	Nilai Taksiran	
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
III	Pengurangan	
1	Mutasi antar OPD	

No	Uraian	Nilai (RP)
2	Reklas ke KDP	
3	Kurang Volume Pekerjaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	0,0029.661.300,00
IV	Saldo Akhir	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp945.000,00 dan Rp945.000,00 Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.61 Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	945.000,00	945.000,00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan		
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	945.000,00	945.000,00
1.3.5.03	Hewan		
1.3.5.05	dst		

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap lainnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.62 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	945.000,00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklas Antar KIB	
4	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	0,000
III	Pengurangan	
1	Tidak memenuhi kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
2	Reklas Antar KIB	
3	Ekstracomtebel	
4	Mutasi antar OPD	
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
IV	Saldo Akhir	945.000,00

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.255.890.059,96 dan Rp3.385.030.374,96

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 202xx dan 20xx masing-masing senilai Rp230.858.374,00 dan Rp194.377.545,00 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.65.Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	230.858.374,00	194.377.545,00
2	Kewajiban Jangka Panjang		
	Jumlah	230.858.374,00	194.377.545,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp230.858.374,00 dan Rp194.377.545,00 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.66.Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2	Utang Bunga		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
4	Pendapatan Diterima Dimuka		
5	Utang Belanja	230.858.374,00	194.377.545,00

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
7	Utang Transfer		
	Jumlah	230.858.374,00	194.377.545,00

5.3.2.1.5 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp230.858.374,00 dan Rp194.377.545,00 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.69. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	230.558.777,00	194.377.545,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	299.597,00	0,00
	Total	230.858.374,00	194.377.545,00

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp230.558.777,00 dan Rp194.377.545,00 Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.70. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 20XX (Rp)	31-Des-20XX (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan		10.169.986,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	230.558.777,00	184.207.559,00
3	Utang Belanja TPG PNSD		
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD		
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD		
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi		
	Total	230.558.777,00	194.377.545,00

5.3.2.1.5.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp299.597,00 dan Rp0,00 Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
-----	--------	--------------------------	--------------------------

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	299.597,00	0,00
2	Utang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
3	Utang Bahan cetak		
4	Utang Alat Tulis Kantor		
5	Dst....		
	Total	299.597,00	0,00

5.3.2.1.5.3. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp12.185.361.583,86 dan Rp11.937.298.521,86. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp.248.063.062,00 atau sebesar 2,08 % di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp11.937.298.521,86.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kantor Camat Praya untuk kegiatan penyelenggaraan Tugas dan fungsi entitas pemerintah dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan senilai Rp20.235.068,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.73. Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	20.235.068,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	20.235.068,00

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp20.235.068,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.74. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	0,00	20.235.068,00
Jumlah	0,00	20.235.068,00

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5.75. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian		Tahun 20XX	Tahun 20XX
1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00
	a. Pendapatan dari pengembalian	0,00	20.235.068,00
	H Dst.....	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	20.235.068,00

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan pajak Daerah LO:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah LRA tahun 20XX senilai Rp0,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp20.235.068,00.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.82. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	20.235.068,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	0,00	0,00
Dst...		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah	0,00	20.235.068,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Ketepatan dalam melakukan pengembalian atas temuan

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan Transfer LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan LO untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.3.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp20.460.033.070,00 dan Rp19.154.390.985,98. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.92. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	20.460.935.570,00	19.154.390.985,98,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	Jumlah	20.460.935.570,00	19.154.390.985,98,00

5.4.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 20.460.935.570,00 dan Rp19.154.390.985,98. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	9.413.692.766,00	8.259.326.740,00

2	Beban Barang dan Jasa	10.194.543.833,00	10.098.886.338,00
3	Beban Bunga	-	-
4	Beban Hibah	-	-
5	Beban Bantuan Sosial	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang	-	-
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	852.698.971,00	796.197.907,98
Jumlah		20.460.935.570,00	19.154.390.985,98

5.4.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp9.413.692.766,00 dan Rp8.259.326.740,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.271.169.957,00	5.665.773.550,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	5.052.680.737,00	4.532.278.239,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	478.361.196,00	423.069.856,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	348.810.000,00	312.600.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	118.580.000,00	126.660.000,00
e.	Beban Tunjangan Beras PNS	269.257.560,00	263.826.060,00
f.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.412.287,00	7.271.084,00
g.	Beban Pembulatan Gaji ASN	68.177,00	68.311,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.039.688.809,00	2.492.844.190,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.039.688.809,00	2.492.844.190,00
3	Beban Honorarium	100.434.000,00	100.709.000,00
a.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.234.000,00	100.709.000,00
b.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.200.000,00	0,00
4	Beban Jasa Pengelolaan BMD	2.400.000,00	-
a.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	0,00
Jumlah		9.413.692.766,00	8.259.326.740,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya beberapa pegawai Kecamatan Praya yang purna tugas sebagai ASN
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp36.181.232,00 (Rp9.413.692.766,00 – Rp9.377.511.534,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa

yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	36.181.23,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	230.558.777,00
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	0
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	230.558.777,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	194.377.545,00
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	10.169.986,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	184.207.559,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	36.181.232,00

5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp10.193.641.333,00 dan Rp10.098.866.338,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	5.357.795.633,00	5.232.272.496,00
1	Beban Barang Pakai Habis	5.330.123.561,00	5.232.272.496,00
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	27.672.072,00	
B	Beban Jasa	4.454.577.242,00	4.515.501.682,00
1	Beban Jasa Kantor	4.216.104.851,00	4.220.871.712,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	28.425.005,00	23.195.138,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	38.046.064,00	137.858.195,00
4	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	13.688.322,00	27.376.637,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	31.913.000,00	5.200.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
6	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	126.400.000,00	101.000.000,00
C	Beban Pemeliharaan	153.240.000,00	115.950.000,00
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.390.000,00	105.960.000,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.850.000,00	9.990.000,00
D	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.476.558,00	139.437.760,00
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.476.558,00	139.437.760,00
E	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.454.400,00	95.704.400,00
-	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.454.400,00	95.704.400,00
	Jumlah	10.193.641.333,00	10.098.866.338,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp10.464.665.165,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp10.193.641.333,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan Hal-Hal berikut:
 - a. Adanya Belanja Modal Tidak memenuhi Kriteria Aset
 - b. Adanya Reklase Aset Tetap Barang Jasa Berupa Gedung BKK di Kelurahan Prapen dan Rehab Gedung d Kelurahan Leneng.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 270.121.331,00 (Rp10.464.665.165,00. - Rp10.194.543.833,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	270.121.331,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	28.186.669,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	514.597,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap-Extracomtable	27.672.072,00
3	Pengurangan Beban LO:	298.308.000,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	439.000,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	297.869.000,00
e	Reklas Persediaan Kadaluausa	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	270.121.331,00

5.4.1.2 Beban Bunga - LO

Beban Bunga untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.4 Beban Hibah - LO

Beban Hibah untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023.

5.4.1.5 Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp852.698.971,00 dan Rp796.197.907,98. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	783.856.310,00	721.334.709,98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.261.846,00	74.171.285,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	741.529,00	691913,00
Dst...		
Jumlah	870.859.685,00	796.197.907,98

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya Penambahan Aset pada Tahun 2024
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.4.1.8 Beban Transfer

Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.8.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Beban Transfer Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.8.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0,00	20.235.088,00
2	Beban-LO	20.460.935.570,00	19.154.390.985,00
	Surplus/(Defisit) Operasional	(20.460.935.570,00)	(19.134.155.917,00)

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

5.4.3.1 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023.

5.4.3.2 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Kantor Camat Praya selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Kantor Camat Praya di Tahun 2024 dan 2023.

5.4.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	0,00	20.235.068,00
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	20.235.068,00
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➤ Beban Operasional	20.460.935.570,00	19.154.390.985,98
✓ Beban Operasional	20.460.935.570,00	19.154.390.985,98
➤ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(20.460.935.570,00)	(19.134.155.917,98)
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(20.460.935.570,00)	(19.134.155.917,98)

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	11.937.298.521,86	10.159.264.745,84

Kantor Camat Praya menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 20N-1 dan 20N-2 pada Kantor Camat Praya yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(20.460.935.570,00)	(19.134.155.917,98)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		
Surplus/(Defisit) – LO	20.460.935.570,00	(19.134.155.917,98)

Pada Tahun 2024 dan 2023 Kantor Camat Praya masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 202N. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.6.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 20NN dan 20N-1 masing senilai Rp20.651.798.632,00 dan Rp20.912.189.694,00.

5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

f. Koreksi Ekuitas Lain-lain – Investasi

Koreksi Ekuitas - Investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 .

g. Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

h. Koreksi Ekuitas Lain-lain - Kewajiban

Koreksi Ekuitas Kewajiban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 sebagai lebih saji dan Rp0,00 sebagai lebih saji.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas/Badan/Kantor Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 20NN	Tahun 20N-1
Saldo Ekuitas Akhir	12.185.361.583,86	11.937.298.521,86

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.3.3*

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 20 Januari 2025
Camat Praya

(LABU BALEN WIRANEGARA, S.STPM.AP)
NIP. 198410032004121001

AMPIRAN

No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	299.597,00	
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		299.597,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya</i>		
3	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tam	184.207.559,00	0,00
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	184.207.559,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024</i>		
4	2.1.06.01.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	230.558.777,00	
	8.1.01.02.01.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		230.558.777,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya</i>		
5	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	9.530.080,00	0,00
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	614.734,00	0,00
	2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	25.000,00	0,00
	2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS		0,00
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	172,00	0,00
	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	9.530.080,00
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0,00	614.734,00
	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	0,00	25.000,00
	8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	172,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024</i>		
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	439.000,00	0,00
	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	439.000,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan barang habis pada periode tahun berkenaan berdasarkan berita acara hasil opname persediaan (Contoh sisa Persediaan Per 31 Desember 2024)</i>		
	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.000,00	0,00
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	215.000,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan pemakaian sisa persediaan barang pakai habis pada periode tahun lalu yang digunakan tahun berkenaan (Contohnya sisa persediaan th 2023 yg di pakai pada tahun 2024)</i>		
	1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	57.200.000,00	
		<i>Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah</i>		57.200.000,00
	1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	169.500.000,00	
		<i>RK</i>		151.339.286,00
	1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		18.160.714,00
	8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	6.792.855,00	
	1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan		6.792.855,00
	8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	59.214.286,00	
	1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		59.214.286,00
	8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.799.999,00	

3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		14.799.999,00
1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	238.095.080,00	
3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		238.095.080,00
1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.780.572,00	
3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		5.780.572,00
1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.780.572,00	
3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus		5.780.572,00
1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	151.553.425,00	
3.07.01.02.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		151.553.425,00
1.08.01.02.0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.646.740,00	
3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		4.646.740,00
1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	100.000,00	
3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain		100.000,00
1.08.01.03.0033	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	166.667,00	
3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara		166.667,00
1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.370.550,00	
3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		2.370.550,00
1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.144.602,00	
3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		6.144.602,00
1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.961.542,00	
3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		12.961.542,00
1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	63.510.933,00	
3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		63.510.933,00
1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.360.333,00	
3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		1.360.333,00
1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.936.263,00	
3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		13.936.263,00
1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	883.300,00	
3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur		883.300,00
1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.932.548,00	
3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		26.932.548,00
1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	5.187.342,00	
3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat		5.187.342,00

08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	2.400.000,00	
07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat		2.400.000,00
08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.737.616,00	
07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		2.737.616,00
08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	9.576.554,00	
07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat		9.576.554,00
08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.195.000,00	
07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio		1.195.000,00
08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	2.516.667,00	
07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film		2.516.667,00
08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	6.923.203,00	
08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone		6.923.203,00
08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.502.200,00	
07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum		2.502.200,00
08.01.07.0034	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	832.000,00	
07.01.07.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya		832.000,00
08.01.08.0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	687.500,00	
07.01.08.0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia		687.500,00
08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.625.000,00	
07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian		1.625.000,00
08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lain	966.525,00	
07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain		966.525,00
08.01.08.0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	65.000,00	
07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		65.000,00
08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	72.831.003,00	
07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer		72.831.003,00
08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.336.000,00	
07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		10.336.000,00
08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	81.082,00	
07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe		81.082,00
08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.111.897,00	
07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		24.111.897,00
08.01.19.0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	4.511.017,00	
07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan		4.511.017,00

1.1.08.01.19.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	1.579.723,00	
1.3.07.01.19.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya		1.579.723,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	52.912.520,00	
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		52.912.520,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	1.091.000,00	
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang		1.091.000,00
8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	264.667,00	
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan		264.667,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	877.140,00	
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah		877.140,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.291.755,00	
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		14.291.755,00
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	807.262,00	
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga		807.262,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	618.000,00	
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		618.000,00
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.549.112,00	
1.3.07.02.01.0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		1.549.112,00
8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	424.100,00	
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III		424.100,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	13.426.290,00	
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar		13.426.290,00
8.1.08.03.02.0036	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	125.000,00	
1.3.07.03.02.0036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air		125.000,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	616.529,00	
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		616.529,00
	extrakompeteble Peralatan dan Mesin	27.672.072,00	
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		27.672.072,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	297.869.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		297.869.000,00

	Jurnal Penyesuaia Aset Tetap Reklas Barjas Berupa Gedung BKK Gedung bangunan BKK Di kelurahan Perapen Rp.35.100.000 dan Rehab Gedung Lurah Leneng Rp.262.769.000		
	dst		
	JUMLAH	1.830.829.962,00	1.830.829.962,00

ntoh

BERITA ACARA REKONSILIASI

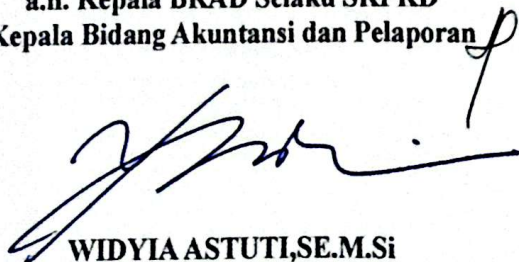
Pada hari ini Kamis tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) **Kantor Camat Praya** yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku KPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024
5. Laporan Perubahan SAL (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024
6. Laporan Arus Kas (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYIA ASTUTI, SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Kantor Camat Praya

LALU BALYA WIRANEGARA, S.STP.M.AP
NIP: 198410032004121001

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi LRA

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN DESEMBER⁽¹⁾
TAHUN ANGGARAN 2024⁽²⁾

Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih + / (-)		LRA Rekonsiliasi
	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
BELANJA DAERAH	20.500.459.346	20.500.459.346	-	-	-	-
BELANJA OPERASI	19.842.176.698	19.842.176.698	-	-	-	-
Belanja Pegawai	9.377.511.534	9.377.511.534	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	10.464.665.164	10.464.665.164	-	-	-	-
BELANJA MODAL	658.282.648	658.282.648	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.702.648	458.702.648	-	-	-	-

Praya, 30 Januari 2024 ⁽⁴⁾

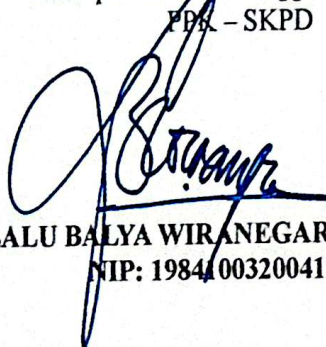
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Praya, 30 Januari 2024 ⁽⁴⁾

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 PPA - SKPD



LALU BALYA WIRANEGARA, S.STP.M.AP
NIP: 198410032004121001

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Neraca

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
 BULAN DESEMBER ⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2024⁽²⁾

Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih + / (-)		NERACA Rekonsiliasi
	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
ASET LANCAR	1.341.500	1.341.500	-	-	-	-
ASET TETAP	12.415.780.957,86	12.415.780.957,86	-	-	-	-
KEWAJIBAN	230.858.374	230.858.374	-	-	-	-
EKUITAS	12.186.264.083,86	12.186.264.083,86	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.417.122.457,86	12.417.122.457,86	-	-	-	-

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
 NIP: 19750302 200003 2 006

Praya, 30 Januari 2024 ⁽⁴⁾
 Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 SKPD



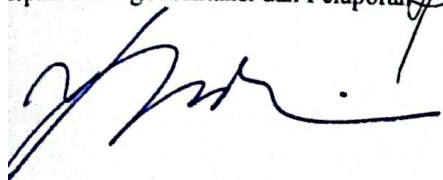
LAKU BALVA WIRANEGARA, S.STP.M.AP
 NIP: 198410032004121001

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Operasional

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
 BULAN DESEMBER ⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2024⁽²⁾

Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
BEBAN OPERASI	20.460.033.070	20.460.033.070	-	-	-	-
Beban Pegawai	9.413.692.766	9.413.692.766	-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa	10.193.641.333	10.193.641.333	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	852.698.971	852.698.971	-	-	-	-

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
 NIP: 19750302 200003 2 006
 (5)

Praya, 30 Januari 2024 ⁽⁴⁾



Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 PPKA SKPD

LALI BALYA WIRANEGERA, S.STP.M.AP
 NIP: 198410032004121001

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 BULAN DESEMBER ⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2024⁽²⁾

Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
EKUITAS AWAL	11.937.298.521,86	11.937.298.521,86	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	20.460.033.070	20.460.033.070	-	-	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	57.200.000	57.200.000	-	-	-	-
RK PPKD	20.651.798.632	20.651.798.632	-	-	-	-
EKUITAS AKHIR	12.186.264.083,86	12.186.264.083,86	-	-	-	-

Cepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYIA ASTUTI, SE.M.Si
 NIP: 19750302 200003 2 006

Praya, 30 Januari 2024 ⁽⁴⁾

Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 PPK - SKPD



LALU BAYU WIRANEGARA, S.STP.M.AP
 NIP: 198410032004121001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN PRAYA

Jl. Diponegoro No. 24 Praya Tel (0370)854018 Kode Pos 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPSAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Bq. Sri Damayanti W	Wk. Penanggung Jawab
2	Lale Lely Yulita	Ketua Tim
3	M. Anwar Imaduddin	Anggota Tim
4	Eka Kumari Dewi	Anggota Tim
5	Mahdan	Anggota Tim

Sesuai dengan surat perintah tugas nomor 700/44/TT/INSP/2024 Tanggal 27 Desember 2024, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 31 Desember 2024 kepada :


Nama Lengkap : Zahrah

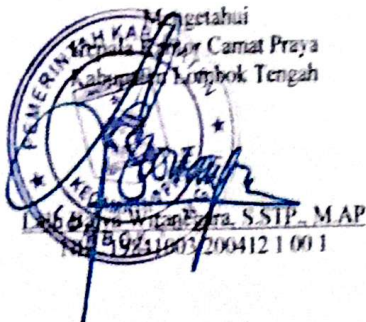
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan BMD pada Kantor Camat Praya

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah Barang	Total
1.	Kertas HVS A4	55.000	1	55.000
2.	Map Pelastik	90.000	6	54.000
3.	Tinta Printer Epson Warna	110.000	3	330.000
4.				
5.				
6.				
7.				

Menyetujui
Pengurus Barang
Kantor Camat Praya
Kabupaten Lombok Tengah


Zahrah
NIP. 19663112 200112 2 002



Tim Pemeriksa :

1. Hj. Bq. Sri Damayanti W

2. Lale Lely Yulita

3. M. Anwar Imaduddin

4. Eka Kumari Dewi

5. Mahdan



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA**

Jl. Diponogor No. 34 Praya Tel (0370)654016 Kode Pos 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/44/TT/INSP/2024 dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan

Penerimaan periode 2 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp. 10.536.572.078	
Pengeluaran periode sama	Rp. 10.536.572.078	
Saldo buku		Rp 0

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari :

Uang tunai di brankas		Rp. 0
Uang kertas <i>(jika ada harus dirincikan)</i>	Rp. 0	
Uang logam <i>(jika ada harus dirincikan)</i>	Rp. 0	
Uang di rekening		Rp. 0
Jumlah kas		Rp. 0
Selisih kas		Rp. 0

Penjelasan atas selisih kas :

.....

Catatan :

.....

Yang Diperiksa,

Bendahara Pengeluaran

Nurmarshuri

NIP. 19720810 200701 1 035

Mengetahui

Kepala Kantor Camat Praya
Kabupaten Lombok Tengah

Cahaya Wiranegara, S.STP., M.AP.
NIP. 19841003 200412 1 00 1

Tim Pemeriksa:

1. Hj. Bq. Sri Damayanti W
2. Lale Lely Yulita
3. M. Anwar Imaduddin
4. Eka Kumari Dewi
5. Mahdan